SENGKETA BERKEPANJANGAN DALAM PANDANGAN ANTROPOLOGI HUKUM

ASEP PRIMADONI
Aseprimadoni1998@gmail.com
2010003600318
UNIVERSITAS EKASAKTI PADANG

A. PENDAHULUAN

Antropologi secara etimologis berasal dari bahasa Yunani. Kata *Anthropos* berarti manusia dan *logos* berarti ilmu pengetahuan. Jadi, antropologi adalah ilmu yang mempelajari manusia. Oleh karena itu antropologi didasarkan pada kemajuan yang telah dicapai ilmu pengetahuan sebelumnya.

Pitirim Sorokin mengatakan bahwa Sosiologi adalah suatu ilmu yang mempelajari hubungan dan pengaruh timbal balik antara aneka macam gejala-gejala sosial (gejala ekonomi dengan agama, keluarga dengan moral, hukum dengan ekonomi) dengan gejala lainnya (nonsosial). Berbeda dengan pendapat Rouceke dan Warren yang mengatakan bahwa Sosiologi adalah ilmu yang mempelajari hubungan manusia dengan kelompok-kelompok. Berdasarkan uraian di atas, maka Sosiologi adalah jelas merupakan ilmu sosial yang objeknya adalah masyarakat sebagai ilmu. Ia berdiri sendiri karena telah memiliki unsur ilmu pengetahuan.

Dalam ilmu antropologi hukum dipelajari juga mengenai Peran, Status atau kedudukan, Nilai, Norma dan juga Budaya atau kebudayaan. Kesemuanya ini merupakan hal-hal yang sangat erat kaitannya dengan ilmu antropologi hukum.

Ilmu Antropologi Hukum dapat dilihat pada persidangan-persidangan atau penyelesaian sengketa yang berlangsung di pengadilan-pengadilan. Hakim yang memiliki pengetahuan akan menggali sumber-sumber hukum yang hidup di tengah masyarakat dalam menyelesaikan perselisihan. Antropologi Hukum menitikberatkan pada budaya hukum yang berkaitan atau

mempengaruhi masalah hukum, yang menimbulkan dampak secara meluas dalam arti sudah melenceng dari kaedah - kaedah sosial yang mengaturnya. Sengketa dapat diselesaikan dengan mempertimbangkan dan mengevaluasi kepentingan para pihak terkait serta menentukan hak-haknya melalui solusi yang wajar.

Dalam konteks hukum, Sengketa diartikan sebagai perselisihan atas suatu hukum atau fakta, atau atas hak, kewajiban, dan kepentingan hukum tertentu antara dua pihak atau lebih. Maka, selanjutnya, Sengketa mengacu pada ketidaksepakatan yang spesifik, di mana masalah dapat diselesaikan dengan menerapkan hukum atau aturan yang relevan. Dengan demikian, dalam kasus Sengketa, para pihak dapat memperdebatkan kasus mereka dan mencapai suatu bentuk penyelesaian. Biasanya, Sengketa melibatkan satu pihak yang berusaha untuk menegakkan hak atau klaim tertentu dan pihak lain yang menentang posisi tersebut. Sengketa dapat terjadi pada siapa saja dan dimana saja. Sengketa dapat bersifat publik maupun bersifat keperdataan dan dapat terjadi baik dalam lingkup lokal, nasional maupun internasional. Sengketa dapat terjadi antara individu dengan individu, antara individu dengan kelompok, antara kelompok dengan kelompok, antara perusahaan dengan perusahaan, antara perusahaan dengan negara, antara negara satu dengan yang lainnya, dan sebagainya. Banyak persoalan sengketa yang tidak terdaftar dalam pengadilan, itupun diatasi dengan budaya hukum.

Adapun tujuan dari penulisan makalah ini, antara lain memenuhi tugas mata kuliah Antropologi Hukum, memberikn gambaran teori mengenai sengketa berkepanjangan dalam pandangan antropologi hukum, serta sebagai arahan saya selaku mahasiswa untuk dapat mengkorelasikan hubungan antara teori dengan kehidupan bermasyarakat di kehidupan nyata.

B. PEMBAHASAN

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (selanjutnya disebut KBBI), pengertian sengketa adalah 1) sesuatu yang menyebabkan perbedaan pendapat; pertengkaran; perbantahan. 2) pertikaian; perselisihan. 3) perkara (dalam pengadilan). Menurut Nurnaningsih Amriani, sengketa merupakan perselisihan yang terjadi antara para pihak dalam perjanjian karena adanya wanprestasi yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam perjanjian tersebut. Sedangkan menurut Takdir Rahmadi, sengketa adalah situasi dan kondisi dimana orang-orang saling mengalami perselisihan yang bersifat factual maupun perselisihan menurut persepsi mereka saja. Sengketa adalah kondisi dimana ada pihak yang merasa dirugikan oleh pihak lain, yang kemudian pihak tersebut menyampaikan ketidakpuasan tersebut kepada pihak kedua. Apabila suatu kondisi menunjukkan perbedaan pendapat, maka terjadilah apa yang dinamakan sengketa tersebut. Dalam konteks hukum khususnya hukum kontrak, yang dimaksud dengan sengketa adalah perselisihan yang terjadi antara para pihak karena adanya pelanggaran terhadap kesepakatan yang telah dituangkan dalam suatu kontrak, baik sebagian maupun keseluruhan. Sehingga dengan kata lain telah terjadi wanprestasi oleh pihak-pihak atau salah satu pihak, karena tidak dipenuhinya kewajiban yang harus dilakukan atau dipenuhi namun kurang atau berlebihan yang akhirnya mengakibatkan pihak satunya dirugikan. Sengketa yang timbul antara para pihak harus diselesaikan agar tidak menimbulkan perselisihan yang berkepanjangan dan agar memberikan keadilan dan kepastian hukum bagi para pihak. Secara garis besar bentuk penyelesaian sengketa dapat dilakukan melalui dua cara yaitu jalur litigasi maupun jalur non-litigasi.

Model antropologi hukum yaitu holistik dengan latar belakang budaya hukum dari masyarakat setempat. Ini memberikan gambaran bahwa hukum tidak hanya dilihat pada persoalan perundangan (normatif) atau hukum adat melainkan ada peran budaya. Peran tersebut

dapat dilihat dari cara menyelesaikan masalah dengan nilai budaya yang telah tertanam. Hukum tidak bisa melihat nilai budaya tersebut tanpa mempelajari antropologi hukum sebab pendekatan dari penyelesaian masalah ini memerlukan pemahaman latar belakang budaya setempat.

Sengketa merupakan permasalahan peradilan yang harus diselesaikan. Menurut R Subekti dan R Tjitrosedibio, peradilan yaitu segala sesuatu yang berkaitan dengan tugas negara untuk menegakkan hukum dan keadilan. Umumnya seseorang mendapat keadilan melalui pengadilan, yang mendapat naungan dari Mahkamah Agung. Ini telah diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum bahwa pengadilan adalah salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman bagi rakyat yang mencari keadilan tetapi itu juga harus mewujudkan kepastian hukum sebagai nilai yang terkandung dalam peraturan hukum (PDP PPZ, 2016).

Berdasarkan pemahaman di atas, pengadilan masih dipercaya oleh masyarakat untuk menyelesaikan sengketa dan ini diterapkan untuk warga negara mempermudah access to justice. Permasalahan ini telah diatur oleh Mahkamah Agung dengan mengeluarkan Perma Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Kenyataannya, mediasi di pengadilan belum efektif bahkan Amarini (2016) berpendapat bahwa langkah yang diambil dalam mendukung pelayanan pengadilan yang maksimal yaitu peningkatan kualitas dan kuantitas SDM, sarana dan prasarana yang mendukung terciptanya sistem, dan lembaga mediasi di pengadilan harus konsisten dalam pelaksanaannya.

Realitanya, banyak persoalan sengketa yang tidak terdaftar dalam pengadilan, itupun diatasi dengan budaya hukum. Budaya tersebut diselidiki melalui model antropologi hukum. Menurut Nader dan Todd, model tersebut membagi tiga tahap proses sengketa yaitu tahap pra-konflik, tahap konflik dan tahap sengketa. Budaya hukum juga memiliki prinsip yaitu ide, sikap,

kepercayaan, harapan, dan pandangan tentang hukum. Disinilah, Nader dan Todd membagi tujuh cara penyelesaian sengketa yaitu lumping it (membiarkan saja), avoidance (mengelak), coercion (paksaan), negotiation (perundingan), mediation, arbitration, dan adjudication (peradilan) (Siregar, 2012).

Model antropologi hukum telah diterapkan dalam dua kasus, contohnya diambil dari artikel jurnal BioKultur yang lokasi sengketanya berada di Desa Adat Tengger dan di Kawasan Sungai Brantas Daerah Kabupaten Kediri. Sengketa yang terjadi di Desa Adat Tengger mengenai pemanfaatan hutan konservasi, yang menimbulkan konflik agraria dengan polisi hutan. Secara konflik struktural, antropologi hukum melihat bahwa sengketa tersebut terjadi karena kebijakan pemerintah yang tidak memihak kepada masyarakat. Setelah ditelusuri secara historis, konflik tersebut merupakan warisan dari kebijakan masa lalu yang belum ditangani serius oleh pemerintah produk reformasi. Ini menjadikan rakyat korban konflik/sengketa terus menerus dilanda konflik agraria tanpa adanya penyelesaian, dikarenakan kebijakan pemerintah dan pihak pemilik hutan tidak menempatkan rasa kemanusiaan dan keadilan sosial terhadap masyarakat sekitar (Kinasih, 2016).

Ini berbeda kasus dengan sengketa di Sungai Brantas Kawasan Kediri, ini terjadi pada penambang pasir hingga mengalami delampan tahapan penyelesaian sengketa. Persoalan ini menemukan titik temu tetapi dikembalikan kepada keputusan pemerintah. Berdasarkan model antropologi hukum, rekomendasi yang dikeluarkan yaitu pemerintah harus lebih peduli terhadap penambang pasir tradisional dan manual, yang merupakan pekerjaan membudaya secara turun temurun. Pembuatan kebijakan dan penerapan peraturan perundangan juga perlu melibatkan warga masyarakat setempat, khususnya penambang pasir. Penegak hukum juga harus tegas dalam menindaklanjuti aktivitas penambang pasir mekanik yang merusak ekologis, dan segera

memperbaiki serta membangun kembali prasarana yang rusak, sebagai wujud terciptanya kesadaran warga masyarakat akan lingkungan (Siregar, 2012).

Jenis-jenis Sengketa :

Sengketa adalah suatu kondisi yang ditimbulkan oleh dua orang atau lebih yang dicirikan oleh beberapa tanda pertentangan secara terang-terangan. Terdapat dua jenis sengketa, yaitu sebagai berikut:

a. Konflik Interest

Konflik interest terjadi manakala dua orang yang memiliki keinginan yang sama terhadap satu obyek yang dianggap bernilai. Konflik kepentingan timbul jika dua pihak merebutkan satu objek.

b. Klaim Kebenaran

Klaim kebenaran di satu pihak dan menganggap pihak lain bersalah. Konflik karena klaim kebenaran diletakkan dalam terminologi benar atau salah. Argumen klaim ini akan didasarkan pada terminologi kebenaran, bukan kepentingan, norma-norma dan hukum. Konflik kepentingan lebih kompromis penyelesaiannya dibanding konflik karena klaim kebenaran.

Tahap-tahap Terjadinya Sengketa

Terjadinya sengketa biasanya ditandai dengan tahapan sebagai berikut:

1. Tahap pra-konflik atau tahap keluhan, yang mengacu kepada keadaan atau kondisi yang oleh seseorang atau suatu kelompok dipersepsikan sebagai hal yang tidak adil dan alasan-alasan atau dasar-dasar dari adanya perasaan itu. Pelanggaran terhadap rasa keadilan itu dapat bersifat nyata atau imajinasi saja. Yang terpenting pihak itu merasakan haknya dilanggar atau diperlakukan dengan salah.

2. Tahap Konflik (conflict), ditandai dengan keadaan dimana pihak yang merasa haknya dilanggar memilih jalan konfrontasi, melemparkan tuduhan kepada pihak pelanggar haknya atau memberitahukan kepada pihak lawannya tentang keluhan itu. Pada tahap ini kedua belah pihak sadar mengenai adanya perselisihan pandangan antar mereka.
3. Tahap Sengketa (dispute), dapat terjadi karena konflik mengalami eskalasi berhubung karena adanya konflik itu dikemukakan secara umum. Suatu sengketa hanya terjadi bila pihak yang mempunyai keluhan telah meningkatkan perselisihan pendapat dari pendekatan menjadi hal yang memasuki bidang publik. Hal ini dilakukan secara sengaja dan aktif dengan maksud supaya ada sesuatu tindakan mengenai tuntutan yang diinginkan.

Penyebab Terjadinya Sengketa

Menurut Rahmadi (2011:8), terdapat enam teori penyebab terjadinya sengketa di masyarakat, yaitu:

a. Teori Hubungan masyarakat

Teori hubungan masyarakat, menitikberatkan adanya ketidakpercayaan dan rivalisasi kelompok dalam masyarakat. Para penganut teori ini memberikan solusi-solusi terhadap konflik-konflik yang timbul dengan cara peningkatan komunikasi dan saling pengertian antara kelompok-kelompok yang mengalami konflik, serta pengembangan toleransi agar masyarakat lebih bisa saling menerima keberagaman dalam masyarakat.

b. Teori Negosiasi prinsip

Teori negosiasi prinsip menjelaskan bahwa konflik terjadi karena adanya perbedaan-perbedaan diantara para pihak. Para penganjur teori ini berpendapat bahwa agar sebuah konflik dapat diselesaikan, maka pelaku harus mampu memisahkan perasaan pribadinya dengan masalah-

masalah dan mampu melakukan negosiasi berdasarkan kepentingan dan bukan pada posisi yang sudah tetap.

c. Teori identitas

Teori ini menjelaskan bahwa konflik terjadi karena sekelompok orang merasa identitasnya terancam oleh pihak lain. Penganut teori identitas mengusulkan penyelesaian konflik karena identitas yang terancam dilakukan melalui fasilitasi lokakarya dan dialog antara wakil-wakil kelompok yang mengalami konflik dengan tujuan mengidentifikasi ancaman-ancaman dan kekhawatiran yang mereka rasakan serta membangun empati dan rekonsiliasi. Tujuan akhirnya adalah pencapaian kesepakatan bersama yang mengakui identitas pokok semua pihak.

d. Teori kesalahpahaman antar budaya

Teori kesalahpahaman antar budaya menjelaskan bahwa konflik terjadi karena ketidakcocokan dalam berkomunikasi diantara orang-orang dari latar belakang budaya yang berbeda. Untuk itu, diperlukan dialog antara orang-orang yang mengalami konflik guna mengenal dan memahami budaya masyarakat lainnya, mengurangi stereotip yang mereka miliki terhadap pihak lain.

e. Teori transformasi

Teori ini menjelaskan bahwa konflik dapat terjadi karena adanya masalah-masalah ketidaksetaraan dan ketidakadilan serta kesenjangan yang terwujud dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat baik sosial, ekonomi maupun politik. Penganut teori ini berpendapat bahwa penyelesaian konflik dapat dilakukan melalui beberapa upaya seperti perubahan struktur dan kerangka kerja yang menyebabkan ketidaksetaraan, peningkatan hubungan, dan sikap jangka panjang para pihak yang mengalami konflik, serta pengembangan proses-proses dan sistem untuk mewujudkan pemberdayaan, keadilan, rekonsiliasi dan pengakuan keberadaan masing-masing.

f. Teori kebutuhan atau kepentingan manusia

Pada intinya, teori ini mengungkapkan bahwa konflik dapat terjadi karena kebutuhan atau kepentingan manusia tidak dapat terpenuhi/terhalangi atau merasa dihalangi oleh orang/ pihak lain. Kebutuhan dan kepentingan manusia dapat dibedakan menjadi tiga jenis yaitu substantif, prosedural, dan psikologis. Kepentingan substantif (substantive) berkaitan dengan kebutuhan manusia yang berhubungan dengan kebendaan seperti uang, sandang, pangan, papan/rumah, dan kekayaan. Kepentingan prosedural (procedural) berkaitan dengan tata dalam pergaulan masyarakat, sedangkan kepentingan psikologis (psychological) berhubungan dengan non-materiil atau bukan kebendaan seperti penghargaan dan empati.

Dari perspektif antropologi hukum, sengketa yang terjadi dalam masyarakat paling tidak dapat dikategorikan dalam 3 macam, yaitu :

- Konflik kepentingan (conflict of interests)
- Konflik nilai-nilai (conflict of values)
- Konflik norma-norma (conflict of norms)

Penyelesaian Sengketa

Menurut Pruitt dan Rubin (2004:4), terdapat lima cara penyelesaian sengketa, yaitu:

- a. Contending (bertanding), yaitu mencoba menerapkan suatu solusi yang lebih disukai oleh salah satu pihak atas pihak yang lainnya.
- b. Yielding (mengalah), yaitu menurunkan aspirasi sendiri dan bersedia menerima kekurangan dari yang sebetulnya diinginkan.
- c. Problem solving (pemecahan masalah), yaitu mencari alternatif yang memuaskan dari kedua belah pihak.

- d. With drawing (menarik diri), yaitu memilih meninggalkan situasi sengketa, baik secara fisik maupun psikologis.
- e. In action (diam), yaitu tidak melakukan apa-apa.

Sedangkan menurut Nader dan Todd Jr (1978:9), terdapat tujuh cara penyelesaian sengketa dalam masyarakat, yaitu:

- a. Lumpingit (membiarkan saja), oleh pihak yang merasakan perlakuan tidak adil, gagal dalam mengupayakan tuntutan. Dia mengambil keputusan untuk mengabaikan saja masalahnya atau isu-isu yang menimbulkan tuntutan dan dia meneruskan hubungan-hubungannya dengan pihak yang dirasakan merugikannya.
- b. Avoidance (mengelak), yaitu pihak yang merasa dirugikan, memilih untuk mengurangi hubungan-hubungan dengan pihak yang merugikannya atau untuk sama sekali menghentikan hubungan tersebut, misalkan dalam hubungan bisnis hal serupa bisa saja terjadi. Dengan mengelak, maka masalah yang menimbulkan keluhan dielakkan saja.
- c. Coercion (paksaan), pihak yang satu memaksakan pemecahan kepada pihak lain, ini bersifat unilateral. Tindakan yang bersifat memaksakan atau ancaman untuk menggunakan kekerasan, pada umumnya mengurangi kemungkinan penyelesaian secara damai.
- d. Negotiation (perundingan), kedua belah pihak yang berhadapan merupakan para pengambil keputusan. Pemecahan masalah yang dihadapi dilakukan oleh mereka berdua, mereka sepakat tanpa adanya pihak yang ketiga yang mencampurinya. Kedua belah pihak berupaya untuk saling menyakinkan, jadi mereka membuat aturan mereka sendiri dan tidak memecahkannya dengan bertitik tolak dari aturan-aturan yang ada.

- e. Mediation (mediasi), pihak ketiga yang membantu kedua belah pihak yang berselisih pendapat untuk menemukan kesepakatan. Pihak ketiga ini dapat ditentukan oleh kedua belah pihak yang bersengketa, atau ditunjukkan oleh pihak yang berwenang untuk itu.
- f. Arbitration (Arbitrase), yaitu dua belah pihak yang bersengketa sepakat untuk meminta perantara kepada pihak ketiga, arbitrator dan sejak semula telah setuju bahwa mereka akan menerima keputusan dari arbitrator tersebut.
- g. Adjudication (peradilan), yaitu pihak ketiga yang mempunyai wewenang untuk mencampuri pemecahan masalah, lepas dari keinginan para pihak yang bersengketa. Pihak ketiga itu juga berhak membuat keputusan dan menegakkan keputusan itu artinya pihak ketiga berupaya bahwa keputusan itu dilaksanakan.

Penyelesaian sengketa dalam Antropologi Hukum

Setiap bentuk masyarakat dimanapun berada dan kapanpun pada dasarnya mempunyai kemampuan untuk menciptakan norma-norma dan mekanisme-mekanisme serta membangun intuisi-intuisi tertentu untuk menyelesaikan setiap sengketa yang muncul dalam masyarakat (Moore,1978). Masyarakat memberi makna sengketa sebagai bagian dari dinamika kehidupan social dan makna sengketa yang diberikan masyarakat juga sangat tergantung pada nilai-nilai, kepercayaan, dan norma-norma yang dianut, serta bentuk-bentuk intuisis social yang dibangun untuk menyelesaikan sengketa. Institusi penyelesaian sengketa yang dikenal dalam masyarakat paling tidak ada 2 macam, yaitu :

1. Institusi penyelesaian masalah secara tradisional, yang bersumber dari system politik dan hukum rakyat dan berlangsung secara tradisional (folk institutions).
2. Institusi penyelesaian sengketa yang dibangun dan system politik dan hukum Negara (state institutions).

C. PENUTUP

Model antropologi hukum yaitu holistik dengan latar belakang budaya hukum dari masyarakat setempat. Ini memberikan gambaran bahwa hukum tidak hanya dilihat pada persoalan perundangan (normatif) atau hukum adat melainkan ada peran budaya. Peran tersebut dapat dilihat dari cara menyelesaikan masalah dengan nilai budaya yang telah tertanam. Hukum tidak bisa melihat nilai budaya tersebut tanpa mempelajari antropologi hukum sebab pendekatan dari penyelesaian masalah ini memerlukan pemahaman latar belakang budaya setempat.

Sengketa merupakan permasalahan peradilan yang harus diselesaikan. Menurut R Subekti dan R Tjitrosedibio, peradilan yaitu segala sesuatu yang berkaitan dengan tugas negara untuk menegakkan hukum dan keadilan. Umumnya seseorang mendapat keadilan melalui pengadilan, yang mendapat naungan dari Mahkamah Agung. Ini telah diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum bahwa pengadilan adalah salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman bagi rakyat yang mencari keadilan tetapi itu juga harus mewujudkan kepastian hukum sebagai nilai yang terkandung dalam peraturan hukum (PDP PPZ, 2016).

Berdasarkan pemahaman di atas, pengadilan masih dipercaya oleh masyarakat untuk menyelesaikan sengketa dan ini diterapkan untuk warga negara mempermudah access to justice. Permasalahan ini telah diatur oleh Mahkamah Agung dengan mengeluarkan Perma Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Kenyataannya, mediasi di pengadilan belum efektif bahkan Amarini (2016) berpendapat bahwa langkah yang diambil dalam mendukung pelayanan pengadilan yang maksimal yaitu peningkatan kualitas dan kuantitas SDM, sarana dan prasarana yang mendukung terciptanya sistem, dan lembaga mediasi di pengadilan harus konsisten dalam pelaksanaannya.

Realitanya, banyak persoalan sengketa yang tidak terdaftar dalam pengadilan, itupun diatasi dengan budaya hukum. Budaya tersebut diselidiki melalui model antropologi hukum. Menurut Nader dan Todd, model tersebut membagi tiga tahap proses sengketa yaitu tahap pra-konflik, tahap konflik dan tahap sengketa. Budaya hukum juga memiliki prinsip yaitu ide, sikap, kepercayaan, harapan, dan pandangan tentang hukum. Disinilah, Nader dan Todd membagi tujuh cara penyelesaian sengketa yaitu lumping it (membiarkan saja), avoidance (mengelak), coercion (paksaan), negotiation (perundingan), mediation, arbitration, dan adjudication (peradilan)

DAFTAR PUSTAKA

- Gokma Toni Parlindungan S, *Asas Nebis In Idem Dalam Putusan Hakim Dalam Perkara Poligami Di Pengadilan Negeri Pasaman Sebagai Ceriminan Ius Constitutum*, Volume 2, Nomor 1, 2020.
- Gokma Toni Parlindungan S, *Pengisian Jabatan Perangkat Nagari Pemekaran Di Pasaman Barat Dalam Rangka Pelaksanaan Otonomi Daerah*, Ensiklopedia Of Journal, Vol 1 No 2 Edisi 2 Januari 2019,
- Harniwati, *Peralihan Hak Ulayat Menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004*, Volume 1, Nomor 3, 2019.
- Jasmir, *Pengembalian Status Hukum Tanah Ulayat Atas Hak Guna Usaha*, Soumatera Law Review, Volume 1, Nomor 1, 2018.
- Jumrawarsi Jumrawarsi, Neviyarni Suhaili, *Peran Seorang Guru Dalam Menciptakan Lingkungan Belajar Yang Kondusif*, Ensiklopedia Education Review, Vol 2, No 3 (2020): Volume 2 No.3 Desember 2020
- Mia Siratni, *Proses Perkawinan Menurut Hukum Adatdi Kepulauan Mentawai Di Sebelum Dan Sesudah Berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*, Ensiklopedia Of Journal, Vol 1 No 2 Edisi 2 Januari 2019,
- Remincel, *Dimensi Hukum Pelanggaran Kecelakaan Lalu Dan Angkutan Jalan Lintas Di Indonesia*, Ensiklopedia Social Review, Volume 1, Nomor 2, 2019.
- R Amin, B Nurdin, *Konflik Perwakafan Tanah Muhammadiyah di Nagari Singkarak Kabupaten Solok Indonesia 2015-2019*, Soumatera Law Review, Volume 3, Nomor 1, 2020.